

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS
PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Penulisan Hukum (Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

Andryan Dwi Prabawa

NIM. E0014026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS
PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Disusun oleh

Andryan Dwi Prabawa

NIM. E0014026

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum

NIP. 19600520 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)

**ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS
PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Disusun oleh :
Andryan Dwi Prabawa
NIM. E0014026

Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 11 April 2018

DEWAN PENGUJI

1. Prof.Dr.Adi Sulistiyono, S.H., M.H
NIP. 19630209 198803 1 003

Ketua

2. Dr. Albertus Sentot Sudarwanto, SH., M.Hum
NIP. 19591127 198601 1 004

Sekretaris

3. Hernawan Hadi, S.H., M.Hum
NIP. 19600520 198601 1 001

Anggota



Mengetahui


Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.
NIP. 19601107 198601 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andryan Dwi Prabawa

NIM : E0014026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Andryan Dwi Prabawa

NIM. E0014026

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 UU Persaingan Usaha. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU Persaingan Usaha dikategorikan sebagai unsur pihak lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.

Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender

ABSTRACT

This study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative prescriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Business Competition. The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study, the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.

Keyword: *Business Competition; Bid Rigging; Tender Committee*

MOTTO

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. (Albert Einstein)

There is no easy walk to freedom anywhere, and many of us will have to pass through the valley of the shadow of death. Again and again before we reach the mountain top of our desires. (Nelson Mandela)

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Mahatma Gandhi)

It often requires more courage to dare to do right than to fear to do wrong. (Abraham Lincoln)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. (R.A Kartini)

PERSEMBAHAN

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa

Kedua Orang Tua dan Kakak Penulis yang dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa.

Sahabat yang senantiasa selalu ada suka maupun duka yang selalu menemani dan memberikan semangat

Almamater Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT.”** Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Segala daya dan upaya telah Penulis lakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan hambatan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Adapun keberhasilan Penulis dengan terwujudnya penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak baik secara moril maupun spiritual kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap langkah dan mencari ridho-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW junjungan dan suri tauladan yang baik untuk Penulis dalam menjalani kehidupan.
3. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
4. Bapak Pranoto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan tenaga serta bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si selaku Pembimbing Akademik.

7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
8. Bapak, Ibu, dan Kakak tercinta yang dengan penuh kesabaran dan kebesaran hati telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa.
9. Rekan-rekan Angkatan 2014 dan seluruh keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan. Akhirnya, Penulis hanya bisa berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Surakarta, 22 Maret 2018



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Persaingan Usaha.....	14
2. Tinjauan Umum Persekongkolan Tender.....	21
3. Tinjauan Umum KPPU.....	34
B. Kerangka Pemikiran.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Panitia Tender dalam	

	Kasus Persekongkolan Tender Berdasarkan	
	UU Persaingan Usaha.....	45
	B. Penegakan Hukum Terhadap Panitia Tender	
	yang Terlibat Kasus Persekongkolan Tender.....	59
BAB IV	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perangkat Hukum yang Ada Sebelum Lahirnya

UU Persaingan Usaha..... 20

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1. Persekongkolan Horizontal.....	23
Bagan 2. Persekongkolan Vertikal.....	23
Bagan 3. Persekongkolan Horizontal dan Vertikal.....	24